



BUPATI PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP
PEKON YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Pekon Setiap Pekon Tahun Anggaran 2015

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggrang 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transimigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transimigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transimigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transimigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pada Kabupaten Pesisir Barat;

16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP PEKON YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat ;
3. Bupati adalah Penjabat Bupati Pesisir Barat ;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Pesisir Barat ;
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Pekon adalah Peratin atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
9. Jumlah Pekon adalah jumlah Pekon yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) , yang selanjutnya disingkat APB Pekon, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Pekon;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

BAB II **TATA CARA PENGHITUNGAN**

Pasal 2

1. Dana Pekon setiap Pekon dihitung berdasarkan :
 - a. Dana pekon setiap kabupaten yang telah ditetapkan Pemerintah;
 - b. Alokasi dasar yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap pekon sebesar 90% (Sembilan puluh per seratus);
 - c. Alokasi dana dihitung berdasarkan formula yang terdiri dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap pekon dengan bobot sebagai berikut:
 - 25% (Dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - 35% (dua puluh per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah;
 - 30% (Tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
2. Rumus perhitungan dana pekon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah dana pekon kabupaten dikurangi alokasi dasar dikali alokasi berdasarkan formula dengan rincian rumus sebagai berikut:

Dana Pekon = (Dana Pekon kabupaten – Alokasi Dasar) x [(25% x rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon kabupaten) + (35% x rasio jumlah penduduk miskin Pekon setiap terhadap total penduduk miskin Pekon kabupaten) + (10% x rasio luas wilayah Pekon setiap terhadap luas wilayah Pekon kabupaten) + (30% x rasio IKG setiap Pekon terhadap total IKG Pekon Kabupaten)].

Langkah-langkah operasional dalam perhitungan dana pekon terdiri dari 3 (tiga) tahapan:

- a. Tahap Persiapan;
- b. Tahap Pelaksanaan;
- c. Tahap Akhir.

Pasal 3

Rincian kegiatan pada tahap persiapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dokumen, data dari informasi yang diperlukan dalam proses perhitungan yaitu:
 1. Dokumen rincian Dana Pekon setiap kabupaten Yang ditetapkan Pemerintah;
 2. Dokumen yang berisikan informasi jumlah penduduk Pekon, angka kemiskinan Pekon, luas wilayah Pekon, dan tingkat kesulitan geografis yang direpresentasikan dalam bentuk data indeks kesulitan geografis
 - a. Menyiapkan kertas kerja (*worksheet*) dalam bentuk *file excel*;
 - b. Menyiapkan folder penyimpanan dokumen, data dan informasi terkait serta cetakan kertas kerja (*worksheet*) dan *file excel* hasil perhitungan.
- b. Menyiapkan Kertas Kerja (*Worksheet*) dalam bentuk *file excel* dengan standar format yang telah ditetapkan.
- c. Menyiapkan folder penyimpanan dokumen, data dan informasi terkait serta cetakan kertas kerja (*worksheet*) dan *file excel* hasil perhitungan.

Pasal 4

Rincian kegiatan pada tahap pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Menginput data-data terkait pada baris dan kolom kertas kerja (*worksheet*) dengan urutan sebagai berikut:

1. Nama kabupaten/kota pada baris (a);
 2. Tahun Anggaran pada baris (b);
 3. Pagu Dana Pekon Kabupaten/Kota pada baris (c);
 4. Jumlah Pekon pada baris (f);
 5. Bobot Jumlah Penduduk Pekon sebesar 25% pada baris (g);
 6. Bobot Angka Kemiskinan Pekon sebesar 35% pada baris (h);
 7. Bobot Luas Wilayah Pekon sebesar 10% pada baris (i);
 8. Bobot Indeks Kesulitan Geografis 30% pada baris (j);
 9. Nomor urut pada kolom (1);
 10. Nama Kecamatan pada kolom (2);
 11. Nama Pekon pada kolom (2), setelah Nama Kecamatan;
 12. Jumlah Penduduk Pekon pada kolom (4);
 13. Jumlah Penduduk Miskin Pekon pada kolom (7);
 14. Luas Wilayah Pekon pada kolom (10); dan
 15. Indeks Kesulitan Geografis pada kolom (13).
- b. Menghitung Dana Pekon setiap Pekon pada baris dan kolom kertas kerja (*worksheet*) dengan urutan sebagai berikut :
1. Menghitung variabel pembagi alokasi sebagai berikut:
 - a. Pagu Alokasi Dasar pada baris (d), dengan rumus:
$$\text{Pagu Alokasi Dasar} = 90\% \times \text{Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota}$$
 - b. Pagu Bagian Formula pada baris (e), dengan rumus:
$$\text{Pagu Bagian Formula} = 10\% \times \text{Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota}$$
 2. Menghitung bagian alokasi dasar Dana Pekon setiap Pekon (Alokasi Dasar) pada kolom (3), dengan rumus :
$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{\text{Pagu Alokasi Dasar}}{\text{Jumlah Desa Di Kab/Kota yang bersangkutan}}$$
 3. Menghitung bagian alokasi formula Dana Pekon setiap Pekon dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Rasio Jumlah Penduduk Pekon (Rasio JP) pada kolom (5), dengan rumus:
$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah penduduk desa}}{\text{total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan}}$$
 - b. Bobot Jumlah Penduduk Pekon (Bobot JP) pada kolom (6), dengan rumus:
$$\text{Bobot JP} = 25\% \times \text{Rasio JP}$$
 - c. Rasio Jumlah Penduduk Miskin Pekon (Rasio JPM) pada kolom (8), dengan rumus:
$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin desa}}{\text{total penduduk miskin desa kabupaten/kota yang bersangkutan}}$$
 - d. Bobot Jumlah Penduduk Miskin Pekon (Bobot JPM) pada kolom (9), dengan rumus:
$$\text{Bobot JPM} = 35\% \times \text{Rasio JPM}$$
 - e. Rasio luas wilayah Pekon (Rasio LW) pada kolom (11), dengan rumus:
$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{total luas wilayah desa Di Kab/Kota yang bersangkutan}}$$
 - f. Bobot Luas Wilayah Pekon (Bobot LW) pada kolom (12), dengan rumus:
$$\text{Bobot LW} = 10\% \times \text{Rasio LW}$$

- g. Rasio Indeks Kesulitan Geografis Pekon (Rasio IKG) pada kolom (14), dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{total IKG Desa di Kab/Kota yang bersangkutan}}$$

- h. Bobot Indeks Kesulitan Geografis Pekon (Bobot IKG) pada kolom (15), dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 30\% \times \text{Rasio IKG}$$

- i. Total bobot pada kolom (16), dengan rumus:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

- j. Bagian Alokasi Formula pada kolom (17), dengan rumus:

$$\text{Alokasi Formula} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}$$

4. Menghitung Dana Pekon setiap Pekon pada kolom (18), dengan rumus:

$$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

Pasal 5

Kegiatan yang dilakukan pada tahap akhir meliputi memverifikasi kebenaran/validitas data yang diinput, menguji hasil penghitungan dan menandatangani kertas kerja (*worksheet*) hasil penghitungan serta menyimpan dokumen dan data komputer terkait dengan rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a. Mencetak kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi.
- b. Memverifikasi kebenaran pengisian data dan kebenaran hasil penghitungan dengan cara membandingkan setiap item data isian pada kertas kerja (*worksheet*) terhadap dokumen sumber, dan menguji hasil penghitungan. Bila ditemukan kesalahan pengisian data maupun kesalahan penghitungan, maka pada item data bersangkutan ditandai dengan tanda centang (✓) untuk selanjutnya dilakukan proses perbaikan pada item tersebut.
- c. Membubuhkan tandatangan pada cetakan kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi :
 - bagi Petugas yang melakukan proses penghitungan pada baris (k); dan
 - bagi Pejabat yang berwenang/bertanggungjawab atas proses penghitungan pada baris (l).
- d. Menyimpan seluruh dokumen terkait dan cetakan kertas kerja (*worksheet*) serta *file excel* hasil perhitungan pada folder yang telah disediakan.

BAB III BESARAN DANA PEKON

Pasal 6

Besaran dana pekon pada masing-masing Pekon Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 7

1. Penyaluran Dana Pekon dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Pekon.
2. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Pekon dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Pekon diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

- 7 -
Pasal 8

1. Penyaluran Dana Pekon dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
2. Penyaluran Dana Pekon tahap I dilakukan setelah Peratin menyampaikan:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Pekon semester sebelumnya.
3. Penyaluran Dana Pekon tahap II dilakukan setelah Peratin menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Pekon semester I.
4. Rincian Dana Pekon yang diterima Pekon setiap Tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) .

**BAB V
PENGUNAAN**

Pasal 9

Dana Pekon diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- a. pemenuhan Kebutuhan Dasar;
- b. pembangunan sarana dan Prasarana Pekon;
- c. pengembangan Potensi ekonomi Lokal; dan
- d. *pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan secara berkelanjutan.*

**BAB VI
PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON**

Pasal 10

Pengelolaan keuangan Pekon dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - (2) Pengeluaran kas Pekon tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) ditetapkan menjadi Peraturan Pekon.
 - (3) Bendahara Pekon sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (1) Peratin dengan dikoordinasikan oleh camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Pekon semester I dan semester II kepada Bupati.
 - (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun anggaran berikutnya.

- 8 -
Pasal 13

1. Bupati dapat menunda penyaluran Dana Pekon dalam hal Peratin tidak menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
2. Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaiannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

Pasal 14

1. Bupati mengurangi penyaluran dana Pekon dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tidak wajar.
2. Sisa Lebih Penggunaan Anggrana (SiLPA) Dana Pekon yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Pekon yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Pekon yang diterima Pekon.
3. Penggunaan Dana Pekon yang tidak sesuai dengan prioritas tidak akan mendapatkan persetujuan dari Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat .

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 27-04-2015
PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,



QUDROTUL IKHWAN

Diundangkan di Krui
pada tanggal 27-04-2015
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN/PESISIR BARAT ,**



FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 19 TAHUN 2015
TANGGAL : 27 - 04 - 2015
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP PEKON
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

BESARAN DANA PEKON MASING-MASING 116 PEKON DI KABUPATEN PESISIR BARAT

NO	Id. Pekon	Nama Desa	Jumlah Pagu Dana Desa/Per Pekon	Tahap I	Tahap II	Tahap III
				40%	40%	20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	18.13.01	PESISIR TENGAH				
1	18.13.01.2001	WAY REDAK	267,408,124	106,963,250	106,963,250	53,481,625
2	18.13.01.2002	SERAY	273,688,607	109,475,443	109,475,443	54,737,721
3	18.13.01.2003	KAMPUNG JAWA	270,245,385	108,098,154	108,098,154	54,049,077
4	18.13.01.2004	RAWAS	272,400,340	108,960,136	108,960,136	54,480,068
5	18.13.01.2006	SUKA NEGARA	269,744,601	107,897,841	107,897,841	53,948,920
6	18.13.01.2007	PAHMUNGAN	271,339,467	108,535,787	108,535,787	54,267,893
		JUMLAH	1,624,826,524	649,930,609	649,930,609	324,965,305
II	18.13.02	PESISIR SELATAN				
1	18.13.02.2001	NEGERI RATU	288,559,788	115,423,915	115,423,915	57,711,958
2	18.13.02.2002	SUKARAME	270,307,610	108,123,044	108,123,044	54,061,522
3	18.13.02.2003	PELITA JAYA	273,725,179	109,490,072	109,490,072	54,745,036
4	18.13.02.2004	SUMUR JAYA	277,726,952	111,090,781	111,090,781	55,545,390
5	18.13.02.2005	TANJUNG JATI	261,080,098	104,432,039	104,432,039	52,216,020
6	18.13.02.2006	PAGAR DALAM	266,354,650	106,541,860	106,541,860	53,270,930
7	18.13.02.2007	TANJUNG SETIA	277,688,120	111,075,248	111,075,248	55,537,624
8	18.13.02.2008	BIHA	290,925,369	116,370,147	116,370,147	58,185,074
9	18.13.02.2009	WAY JAMBU	283,113,182	113,245,273	113,245,273	56,622,636
10	18.13.02.2010	MARANG	339,349,334	135,739,734	135,739,734	67,869,867
11	18.13.02.2011	TANJUNG RAYA	280,958,950	112,383,580	112,383,580	56,191,790
12	18.13.02.2012	BANGUN NEGARA	275,921,214	110,368,486	110,368,486	55,184,243
13	18.13.02.2013	ULOK MANIK	272,334,693	108,933,877	108,933,877	54,466,939
14	18.13.02.2014	PAKU NEGARA	289,919,173	115,967,669	115,967,669	57,983,834
15	18.13.02.2015	TULUNG BAMBAN	279,073,007	111,629,203	111,629,203	55,814,601
		JUMLAH	4,227,037,316	1,690,814,926	1,690,814,926	845,407,463
III	18.13.03	LEMONG				
1	18.13.03.2001	TANJUNG JATI	273,722,076	109,488,830	109,488,830	54,744,415
2	18.13.03.2002	TANJUNG SAKTI	265,360,967	106,144,387	106,144,387	53,072,193
3	18.13.03.2003	WAY BATANG	269,458,866	107,783,546	107,783,546	53,891,773
4	18.13.03.2004	LEMONG	279,489,548	111,795,819	111,795,819	55,897,910
5	18.13.03.2005	CAHAYA NEGERI	267,873,905	107,149,562	107,149,562	53,574,781
6	18.13.03.2006	MALAYA	279,244,668	111,697,867	111,697,867	55,848,934
7	18.13.03.2007	BAMBANG	267,838,015	107,135,206	107,135,206	53,567,603
8	18.13.03.2008	PAGAR DALAM	270,032,603	108,013,041	108,013,041	54,006,521
9	18.13.03.2009	BANDAR PUGUNG	269,913,373	107,965,349	107,965,349	53,982,675
10	18.13.03.2010	PENENGAHAN	284,978,345	113,991,338	113,991,338	56,995,669
11	18.13.03.2011	RATA AGUNG	279,659,062	111,863,625	111,863,625	55,931,812
12	18.13.03.2012	SUKAMULYA	274,141,250	109,656,500	109,656,500	54,828,250
13	18.13.03.2013	PARDI HAGA	269,617,779	107,847,112	107,847,112	53,923,556
		JUMLAH	3,551,330,458	1,420,532,183	1,420,532,183	710,266,092
IV	18.13.04	PESISIR UTARA				
1	18.13.04.2001	KURIPAN	268,584,720	107,433,888	107,433,888	53,716,944
2	18.13.04.2002	PADANG RINDU	271,182,590	108,473,036	108,473,036	54,236,518
3	18.13.04.2003	NEGERI RATU	267,249,304	106,899,721	106,899,721	53,449,861
4	18.13.04.2004	KERBANG DALAM	268,307,437	107,322,975	107,322,975	53,661,487
5	18.13.04.2005	KOTA KARANG	265,436,878	106,174,751	106,174,751	53,087,376
6	18.13.04.2006	BALAM	266,581,552	106,632,621	106,632,621	53,316,310
7	18.13.04.2007	WAY NARTA	265,251,200	106,100,480	106,100,480	53,050,240
8	18.13.04.2008	KERBANG LANGGAR	270,411,665	108,164,666	108,164,666	54,082,333
9	18.13.04.2009	WALUR	271,368,403	108,547,361	108,547,361	54,273,681
10	18.13.04.2010	BATU RAJA	270,696,598	108,278,639	108,278,639	54,139,320
11	18.13.04.2011	PEMANCAR	271,935,305	108,774,122	108,774,122	54,387,061
12	18.13.04.2012	GEDAU	269,957,386	107,982,954	107,982,954	53,991,477
		JUMLAH	3,226,963,039	1,290,785,216	1,290,785,216	645,392,608
V	18.13.05	KARYA PENGGAWA				
1	18.13.05.2001	KEBUAYAN	266,287,057	106,514,823	106,514,823	53,257,411
2	18.13.05.2002	WAY NUKAK	276,395,473	110,558,189	110,558,189	55,279,095
3	18.13.05.2003	WAY SINDI	277,250,344	110,900,138	110,900,138	55,450,069
4	18.13.05.2004	PENENGAHAN	300,907,973	120,363,189	120,363,189	60,181,595
5	18.13.05.2005	MENYANCANG	268,598,084	107,439,234	107,439,234	53,719,617
6	18.13.05.2006	LA'AY	269,144,415	107,657,766	107,657,766	53,828,883
7	18.13.05.2007	PENGGAWA V ULU	274,950,810	109,980,324	109,980,324	54,990,162
8	18.13.05.2008	PENGGAWA V TENGAH	267,627,101	107,050,840	107,050,840	53,525,420
9	18.13.05.2009	WAY SINDI UTARA	262,870,559	105,148,224	105,148,224	52,574,112
10	18.13.05.2010	TEMBAKAK WAY SINDI	269,952,711	107,981,084	107,981,084	53,990,542
11	18.13.05.2011	WAY SINDI HANUAN	286,164,397	114,465,759	114,465,759	57,232,879
12	18.13.05.2012	ASAHDAN WAY SINDI	266,833,724	106,733,489	106,733,489	53,366,745
		JUMLAH	3,286,982,649	1,314,793,059	1,314,793,059	657,396,530

VI	18.13.06	PULAU PISANG				
1	18.13.06.2001	PASAR PULAU PISANG	268,392,556	107,357,023	107,357,023	53,678,511
2	18.13.06.2002	LABUHAN	267,003,327	106,801,331	106,801,331	53,400,665
3	18.13.06.2003	BANDAR DALAM	262,454,260	104,981,704	104,981,704	52,490,852
4	18.13.06.2004	PEKON LOK	262,225,944	104,890,378	104,890,378	52,445,189
5	18.13.06.2005	SUKADANA	265,941,712	106,376,685	106,376,685	53,188,342
6	18.13.06.2006	SUKA MARGA	263,211,857	105,284,743	105,284,743	52,642,371
JUMLAH			1,589,229,657	635,691,863	635,691,863	317,845,931
VII	18.13.07	WAY KRUI				
1	18.13.07.2001	PAJAR BULAN	261,397,014	104,558,806	104,558,806	52,279,403
2	18.13.07.2002	BUMI WARAS	260,721,481	104,288,592	104,288,592	52,144,296
3	18.13.07.2003	BANJAR AGUNG	260,642,522	104,257,009	104,257,009	52,128,504
4	18.13.07.2004	PENGGAWA V ILIR	263,931,466	105,572,586	105,572,586	52,786,293
5	18.13.07.2005	ULU KRUI	268,901,991	107,560,796	107,560,796	53,780,398
6	18.13.07.2006	GUNUNG KEMALA	270,599,653	108,239,861	108,239,861	54,119,931
7	18.13.07.2007	LABUHAN MANDI	273,517,257	109,406,903	109,406,903	54,703,451
8	18.13.07.2008	SUKA BARU	268,554,048	107,421,619	107,421,619	53,710,810
9	18.13.07.2009	PENGGAWA LIMA	263,499,909	105,399,964	105,399,964	52,699,982
10	18.13.07.2010	GUNUNG KEMALA	268,521,720	107,408,688	107,408,688	53,704,344
JUMLAH			2,660,287,061	1,064,114,825	1,064,114,825	532,057,412
VIII	18.13.08	KRUI SELATAN				
1	18.13.08.2001	BALAI KENCANA	281,289,425	112,515,770	112,515,770	56,257,885
2	18.13.08.2002	WAY SULUH	274,676,081	109,870,432	109,870,432	54,935,216
3	18.13.08.2003	WAY NAPAL	275,615,899	110,246,359	110,246,359	55,123,180
4	18.13.08.2004	PADANG HALUAN	270,426,806	108,170,722	108,170,722	54,085,361
5	18.13.08.2005	LINTIK	269,610,484	107,844,193	107,844,193	53,922,097
6	18.13.08.2006	WALUR	269,548,322	107,819,329	107,819,329	53,909,664
7	18.13.08.2007	PEMERIHAN	266,254,909	106,501,964	106,501,964	53,250,982
8	18.13.08.2008	MANDIRI SEJATI	266,281,229	106,512,491	106,512,491	53,256,246
9	18.13.08.2009	PADANG RAYA	271,092,683	108,437,073	108,437,073	54,218,537
10	18.13.08.2009	SUKA JADI	267,594,278	107,037,711	107,037,711	53,518,856
JUMLAH			2,712,390,115	1,084,956,046	1,084,956,046	542,478,023
IX	18.13.09	NGAMBUR				
1	18.13.09.2001	SUMBER AGUNG	284,812,305	113,924,922	113,924,922	56,962,461
2	18.13.09.2002	ULOK MUKTI	290,747,076	116,298,830	116,298,830	58,149,415
3	18.13.09.2003	NEGERI RATU	284,450,471	113,780,188	113,780,188	56,890,094
4	18.13.09.2004	PEKON MON	304,421,933	121,768,773	121,768,773	60,884,387
5	18.13.09.2005	GEDUNG CAHYA KUNING	298,067,108	119,226,843	119,226,843	59,613,422
6	18.13.09.2006	SUKA BANJAR	300,177,075	120,070,830	120,070,830	60,035,415
7	18.13.09.2007	SUKA NEGARA	279,885,650	111,954,260	111,954,260	55,977,130
8	18.13.09.2008	MUARA TEMBULIH	273,203,174	109,281,270	109,281,270	54,640,635
9	18.13.09.2009	BUMI RATU	287,707,435	115,082,974	115,082,974	57,541,487
JUMLAH			2,603,472,227	1,041,388,891	1,041,388,891	520,694,445
X	18.13.10	BENGKUNAT				
1	18.13.10.2001	NEGERI RATU NGARAS	276,317,790	110,527,116	110,527,116	55,263,558
2	18.13.10.2002	KOTA BATU	278,127,375	111,250,950	111,250,950	55,625,475
3	18.13.10.2003	MULANG MAYA	280,693,064	112,277,225	112,277,225	56,138,613
4	18.13.10.2004	RAJABASA	281,376,251	112,550,500	112,550,500	56,275,250
5	18.13.10.2005	PARDASUKA	290,608,542	116,243,417	116,243,417	58,121,708
6	18.13.10.2006	PADANG DALAM	275,827,743	110,331,097	110,331,097	55,165,549
7	18.13.10.2007	SUKA MAJU	276,694,034	110,677,613	110,677,613	55,338,807
8	18.13.10.2008	SUKARAME	280,515,554	112,206,221	112,206,221	56,103,111
9	18.13.10.2009	BANDAR JAYA	277,897,921	111,159,168	111,159,168	55,579,584
JUMLAH			2,518,058,273	1,007,223,309	1,007,223,309	503,611,655
XI	18.13.11	B. BELIMBING				
1	18.13.11.2001	PAGAR BUKIT	350,045,759	140,018,304	140,018,304	70,009,152
2	18.13.11.2002	TANJUNG KEMALA	300,594,754	120,237,902	120,237,902	60,118,951
3	18.13.11.2003	SUKAMARGA	302,405,998	120,962,399	120,962,399	60,481,200
4	18.13.11.2004	KOTA JAWA	316,245,920	126,498,368	126,498,368	63,249,184
5	18.13.11.2005	PENYANDINGAN	288,511,590	115,404,636	115,404,636	57,702,318
6	18.13.11.2006	BANDAR DALAM	310,833,733	124,333,493	124,333,493	62,166,747
7	18.13.11.2007	WAY HARU	304,033,564	121,613,425	121,613,425	60,806,713
8	18.13.11.2008	PEMERIHAN	294,953,008	117,981,203	117,981,203	58,990,602
9	18.13.11.2009	SUKANEGERI	301,285,796	120,514,319	120,514,319	60,257,159
10	18.13.11.2010	SUMBEREJO	277,711,127	111,084,451	111,084,451	55,542,225
11	18.13.11.2011	SIRING GADING	278,944,609	111,577,844	111,577,844	55,788,922
12	18.13.11.2012	WAY TIAS	284,772,676	113,909,071	113,909,071	56,954,535
13	18.13.11.2013	TANJUNG REJO	283,487,588	113,395,035	113,395,035	56,697,518
14	18.13.11.2014	PAGAR BUKIT INDUK	280,943,559	112,377,424	112,377,424	56,188,712
JUMLAH			4,174,769,681	1,669,907,873	1,669,907,873	834,953,936
JUMLAH TOTAL (I s.d XI)			32,175,347,000	12,870,138,800	12,870,138,800	6,435,069,400

Keterangan :

- 1. Jumlah Pagu DD Kabupaten 32,175,347,000
- 2. Dibagi 116 Pekon 32,175,347,000
- 3. Saldo -

PENJABAT BUPATI PESISIR BARAT,

QUDROTUL IKHWAN

No	N. Pekon	Nama Desa	Alamat Desa	Analisa Pendapatan Formula												Pagu Dana Desa per Desa			
				Analisa Pendapatan			Analisa Pendapatan Nondesa			Lain Wilayah			IKO			Total Pend.	Analisa Pendapatan Formula		
				Analisa Pendapatan	Radio Pendapatan Pendapatan	Bobot	Analisa Pendapatan Nondesa	Radio Jumlah Pendapatan Nondesa	Bobot	Lain Wilayah	Radio Lain Wilayah	Bobot	IKO Pendapatan Gereja	Radio IKO Pendapatan Gereja	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) = (1) + (2) + (3) + (4)	(19)	(18) - (1) - (17)
7	18.13.10.2007	SUKA MAJU	249,636,313	1,395	0.00989	0.00247	109	0.00266	0.093%	64.21	0.02215	0.221%	53.39	0.00930	0.279%	0.00841	27,057,721	276,694,034	
8	18.13.10.2008	SUKARAME	249,636,313	1,058	0.00750	0.00188	296	0.00722	0.253%	100.44	0.03465	0.346%	33.07	0.00576	0.173%	0.00960	30,879,241	280,515,554	
9	18.13.10.2009	BANDAR JAYA	249,636,313	762	0.00540	0.00135	384	0.00937	0.328%	31.88	0.01100	0.110%	58.41	0.01017	0.305%	0.00878	28,261,608	277,897,921	
XI 18.13.11 BENGKUNAT BELIMBING																			
1	18.13.11.2001	PAGAR BUKIT	249,636,313	3,339	0.02368	0.00592	2,163	0.05279	1.848%	121.22	0.04181	0.418%	50.28	0.00876	0.263%	0.03121	100,409,446	350,045,759	
2	18.13.11.2002	TANJUNG KEMALA	249,636,313	1,534	0.01088	0.00272	863	0.02106	0.737%	75.43	0.02602	0.260%	60.16	0.01048	0.314%	0.01584	50,958,442	300,594,754	
3	18.13.11.2003	SUKAMARGA	249,636,313	2,302	0.01633	0.00408	899	0.02194	0.768%	43.59	0.01504	0.150%	60.00	0.01045	0.314%	0.01640	52,769,685	302,405,998	
4	18.13.11.2004	KOTA JAWA	249,636,313	2,137	0.01516	0.00379	1,424	0.03476	1.216%	57.82	0.01994	0.199%	52.70	0.00918	0.275%	0.02070	66,609,607	316,245,920	
5	18.13.11.2005	PENYANDINGAN	249,636,313	1,447	0.01026	0.00257	644	0.01572	0.550%	36.29	0.01252	0.125%	52.88	0.00921	0.276%	0.01208	38,875,277	288,511,590	
6	18.13.11.2006	BANDAR DALAM	249,636,313	1,761	0.01249	0.00312	1,284	0.03134	1.097%	56.26	0.01941	0.194%	57.18	0.00996	0.299%	0.01902	61,197,420	310,833,733	
7	18.13.11.2007	WAY HARU	249,636,313	1,618	0.01148	0.00287	1,109	0.02707	0.947%	42.02	0.01449	0.145%	59.60	0.01038	0.311%	0.01691	54,397,251	304,033,564	
8	18.13.11.2008	PEMERIHAN	249,636,313	2,580	0.01830	0.00457	372	0.00908	0.318%	117.12	0.04040	0.404%	43.86	0.00764	0.229%	0.01408	45,316,695	294,953,008	
9	18.13.11.2009	SUKANEGERI	249,636,313	2,349	0.01666	0.00416	765	0.01857	0.654%	55.29	0.01907	0.191%	65.93	0.01148	0.345%	0.01605	51,649,483	301,285,796	
10	18.13.11.2010	SUMBEREJO	249,636,313	1,326	0.00940	0.00235	124	0.00303	0.106%	64.33	0.02219	0.222%	59.25	0.01032	0.310%	0.00873	28,074,814	277,711,127	
11	18.13.11.2011	SIRING GADING	249,636,313	849	0.00602	0.00151	387	0.00945	0.331%	9.57	0.00330	0.033%	75.92	0.01323	0.397%	0.00911	29,308,297	278,944,609	
12	18.13.11.2012	WAY TIAS	249,636,313	1,423	0.01009	0.00252	458	0.01118	0.391%	20.32	0.00701	0.070%	72.41	0.01261	0.378%	0.01092	35,136,363	284,772,676	
13	18.13.11.2013	TANJUNG REJO	249,636,313	1,544	0.01095	0.00274	326	0.00796	0.278%	75.51	0.02605	0.260%	45.81	0.00798	0.239%	0.01052	33,851,275	283,487,588	
14	18.13.11.2014	PAGAR BUKIT INDUK	249,636,313	919	0.00652	0.00163	537	0.01311	0.459%	38.57	0.01331	0.133%	41.77	0.00728	0.218%	0.00973	31,307,246	280,943,559	
Total				140,997	1	0.25	40,971	1	0.35	2,899	1	0.10	5,740.82	1	0.30	1	3,217,534,700	32,175,347,000	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten X	32,175,347,000
Pagu Alokasi Dasar (90%)	28,957,812,300
Pagu Bagian Formula (10%)	3,217,534,700
Jumlah Desa	116
(f)	

Bobot	
JP	25% (g)
AK	35% (h)
LW	10% (i)
IKG	30% (j)

Pejabat berwenang/bertanggung jawab

PPTK

Petugas Penghitung Dan Pekon

ARMEN QODAR,S.P.
NIP. 19730418 200003 1 003

AHMAD ZAINI,S.IP
NIP.19770304 200604 1 010

RIWAN PUSPA WIJAYA,S.Sos
NIP. 19830604 200804 1 001

Krui, April 2015